



LPPD 2018

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru memiliki kewajiban menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), penyusunan LPPD ini berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Penyampaian LPPD pada dasarnya mengetengahkan gambaran kinerja secara utuh sepanjang Tahun 2018 yang merupakan implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Segala saran, pendapat maupun kritik yang bersifat konstruktif, sangat diharapkan untuk meningkatkan bobot pelaksanaan tugas ke depan, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Kotabaru, Februari 2019

Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru,



H. ABDUL KADIR, S.Sos, MAP

NIP. 19620310 198503 1 023

Pembina Tk.I(IV/b)

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan dan Tugas	1
1. Kedudukan	1
2. Tugas Pokok	3
3. Fungsi.....	3
C. Struktur Organisasi.....	6
D. Sistematika Penyajian.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. RPJMD 2016-2021	10
B. Rencana Strategis 2016-2021	10
1. Visi	11
2. Misi.....	11
3. Tujuan	12
4. Sasaran	12
C. Penetapan Kinerja Tahun 2018.....	12
BAB III URUSAN DISENTRALISASI	14
A. Ringkasan Urusan Wajib/Pilihan (Anggaran Belanja dan Realisasi)	14
B. Prioritas Urusan Wajib/Pilihan yang dilaksanakan	14
1. Program dan Kegiatan	14
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	15
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	15

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran	16
5. Proses Perencanaan Pembangunan	16
6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan ..	17
7. Permasalahan dan Solusi.....	18
C. Indikator Kinerja Kunci (IKK)	20
1. Tataran Pengambilan Kebijakan	20
2. Tataran Pelaksanaan Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum	20
3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib/Pilihan	20
BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	21
A. Kerjasama Antar Daerah.....	21
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	21
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah.....	21
BAB V PENUTUP.....	22
A. Kesimpulan	22
B. Saran	22

Lampiran-lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Dalam pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007, Pemerintah Daerah wajib mempertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD merupakan suatu bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat yang mewajibkan setiap Pemerintah Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal diatas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru juga wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai laporan kepada Kepala Daerah yang selanjutnya disusun oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk dijadikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018.

B. Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan dan Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016) Pasal 3 menyatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja, Pasal 2 ayat 2 menyatakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 61 Tahun 2016 Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
 2. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
 3. Sub Bidang Anggaran Fasilitas Pembiayaan, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Administrasi dan Pelayanan Perbendaharaan
 2. Sub bidang Pengelolaan Kas dan Perpajakan
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Akuntansi
 2. Sub Bidang Pelaporan
- f. Bidang Aset terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penatausahaan Aset
 2. Sub Bidang Pengelolaan Aset
 3. Sub Bidang Pengendalian Aset

g. Kelompok Jabatan Fungsional

2. **Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- c. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan dibidang anggaran;
- d. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan dibidang perbendaharaan;
- e. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan dibidang akuntansi dan pelaporan;
- f. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan dibidang aset;
- g. penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- h. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. penyelenggara pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi

- (1). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, menetapkan,

menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

(2). Uraian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan menetapkan kebijakan teknis dan standar operasional prosedur (SOP) di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelola keuangan dan aset daerah.
- c. menyelenggarakan pengadaan prasarana dan sarana penunjang terkait bidang tugas Badan.
- d. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja program/kegiatan pengelolaan kesekretariatan Badan
- e. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang anggaran
- f. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang perbendaharaan
- g. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang akuntansi dan pelaporan;
- h. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang aset;
- i. Menyelenggarakan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rancangan Perubahan APBD, berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disetujui bersama antara

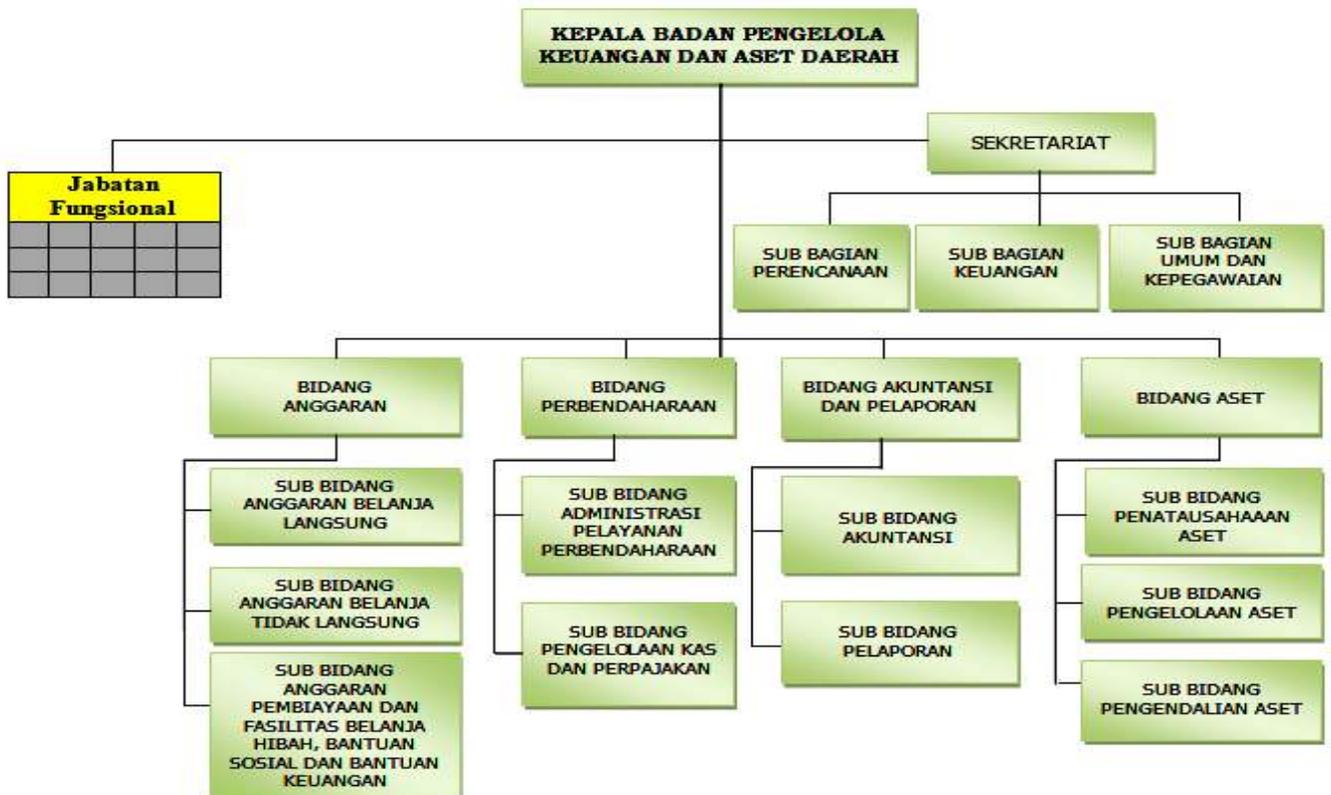
- Bupati dan Pimpinan DPRD menyelenggarakan penyusunan RKA-SKPD
- j. Menyelenggarakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD)
 - k. Menyelenggarakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah terkait pelayanan di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah:
 - l. Menyelenggarakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - m. Menyelenggarakan pemantauan terkait penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - n. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - o. Menyimpan uang daerah dan melaksanakan penempatan uang daerah
 - p. Menyelenggarakan pembayaran perhitungan pihak ketiga atas beban APBD berupa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, Iuran Wajib Pegawai, Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen) dan beban perhitungan pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan berlaku;
 - q. Menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD dan Instansi terkait dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan kebijakan bidang tugas
 - r. Menyelenggarakan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Badan; dan
 - s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru, Pasal 3 menyebutkan bahwa unsur-unsur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Anggaran
- c. Bidang Perbendaharaan
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- e. Bidang Aset

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPKAD
KABUPATEN KOTABARU**



D. Sistematika Penyajian

LPPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tahun 2018 disusun dalam tata urutan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
 - 1. Kedudukan dan Susunan Organisasi
 - 2. Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. RPJMD 2016- 2021
- B. Rencana Strategis 2016 -2021
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - 3. Tujuan
 - 4. Sasaran
 - 5. Indikator Kinerja Utama (IKU) jika ada
- C. Penetapan Kinerja Tahun 2018

BAB III URUSAN DISENTRALISASI

- A. Ringkasan Urusan Wajib/Pilihan (Anggaran Belanja dan Realisasi)
- B. Prioritas Urusan Wajib/Pilihan yang dilaksanakan
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
 - 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 5. Proses Perencanaan Pembangunan
 6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
(Lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
 7. Permasalahan dan Solusi
- C. Indikator Kinerja Kunci (IKK)
1. Tataran Pengambilan Kebijakan
 2. Tataran Pelaksanaan Kebijakan (8 Aspek)
Administrasi Umum
 3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat
Capaian Kinerja Urusan Wajib/Pilihan

BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- A. Kerjasama Antar Daerah
1. Daerah yang Diajak Kerjasama
 2. Dasar Hukum
 3. Bidang Kerjasama
 4. Nama Kegiatan
 5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat
dan Golongan
 6. Sumber dan Jumlah Anggaran
 7. Jangka Waktu Kerjasama
 8. Hasil (output) dari Kerjasama
 9. Permasalahan dan Solusi
 10. Hal Lain yang dianggap Perlu untuk dilaporkan
- B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
1. Mitra yang Diajak Kerjasama
 2. Dasar Hukum
 3. Bidang Kerjasama
 4. Nama Kegiatan
 5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat
dan Golongan
 6. Sumber dan Jumlah Anggaran

7. Jangka Waktu Kerjasama
 8. Hasil (output) dari Kerjasama
 9. Permasalahan dan Solusi
 10. Hal lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
- C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah
1. Forum Koordinasi
 2. Materi Koordinasi
 3. Instansi Vertikal yang Terlihat
 4. Sumber dan Jumlah Anggaran
 5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
 6. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan
 7. Hasil dan Manfaat Koordinasi
 8. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
 9. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Lampiran - lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RPJMD 2016 – 2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru disusun sebagai konsekuensi terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Di dalam ketiga peraturan perundang-undangan dimaksud disebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) didasarkan pada penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah.

Tujuan penyusunan RPJM Kabupaten Kotabaru untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah. Sebagai konsekuensi calon kepala daerah terpilih, maka program tersebut harus dirumuskan sebagai perencanaan pembangunan dan direalisasikan dalam dokumen perencanaan. Selain itu RPJMD juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar “*stakeholders*” untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Kotabaru.

B. Rencana Strategis 2016 – 2021

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru 2016-2021 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional, Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah menetapkan rencana strategis tahun 2016-2021 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi serta tujuan strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.

Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen perencanaan strategis tersebut telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.

Komponen-komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Visi*

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru yaitu :

***”Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
Transparan dan Akuntabel”***

2. *Misi*

Misi merupakan unsur yang paling fundamental bagi visi suatu organisasi. agar visi dapat diwujudkan maka misi harus dinyatakan dengan jelas dan menunjuk pada apa yang harus dipenuhi dan dapat dicapai pada masa yang akan datang. Adapun Misi dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru adalah :

1. Mewujudkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah yang tertib dan optimal.

3. *Tujuan*

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi, misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan yang ditetapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru meliputi :

1. Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan
2. Tertib Administrasi Pengelolaan Aset

4. *Sasaran*

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru antara lain :

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Aset

C. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebagaimana Tabel berikut dijelaskan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 mempunyai 7 Program dan 52 Kegiatan.

Capaian Kinerja Tahun 2018 terhadap perjanjian kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Bupati Kotabaru, masih dalam proses pemeriksaan LKPD oleh BPK RI Perwakilan Kalsel.

Tabel 2.1
Penetapan Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2017	Capaian 2018
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	Dalam Proses oleh BPK RI
2	Meningkatkan Kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	Lamanya waktu penyusunan RAPBD	100 % Sesuai Permendagri 13/2006	100 % 24-09-2018 Dikurang 29-11-2018 48 hari	Tercapai Triwulan IV Tahun 2018
3	Meingkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indek Kepuasan Masyarakat	80	80,01	Tercapai di Triwulan IV Tahun 2018
		Predikat Penilaian Akip	B	B	Predikat penilaian Akip di tahun 2018
		Persentase temuan BPK RI/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	7 temuan	-
		Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	Tercapai di Triwulan IV Tahun 2018

BAB III
URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Wajib/Pilihan (Anggaran Belanja dan Realisasi)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru masuk dalam Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan, Tahun 2018 Anggaran Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru sebesar Rp. 37.902.470.666,-terdiri dari Belanja Langsung Rp. 22.790.406.700,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.15.112.063.966,-

Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 sebesar Rp. 35.247.992.316,- Terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp.20.954.420.380,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.14.293.571.936,- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel diberikut :

Tabel 3.1

Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2018

Jenis Belanja	Anggaran 2018	Realisasi 2018
Belanja	37.902.470.666,-	35.247.992.316,-
Belanja Tidak Langsung	15.112.063.966,-	14.293.571.936,-
Belanja Langsung	22.790.406.700,-	20.954.420.380,-

B. Prioritas Urusan Wajib/Pilihan yang Dilaksanakan

1. Program dan Kegiatan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2018 melaksanakan 7 Program dan 52Kegiatan, dari Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Keuangan.

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal dari Kementrian untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru tidak ada.

3. Jumlah Pegawai, Kualitas Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Ketersediaan sumberdaya aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kotabaru secara kuantitatif sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berjumlah 52 orang PNS yang terdiri dari 32 PNS Pria dan 20 PNS Wanita, ditambah 24 Orang Tenaga Honorer/Outsourcing.

Tabel 3.2
Jumlah ASN BPKAD Kabupaten Kotabaru
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Keadaan s.d 31 Desember 2018

No	UNIT KERJA	Tingkat Pendidikan										Jlh
		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2		
1	Kepala Badan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
2	Sekretaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Bidang-Bidang	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	
4	Subbag/Subbid	0	0	3	0	0	0	1	4	5	13	
5	Pelaksana	0	1	12	0	1	5	0	15	0	34	
Jumlah		0	1	15	0	1	5	1	20	9	52	

Sumber : BPKAD Kabupaten Kotabaru

Tabel 3.3
Jumlah ASN BPKAD Kabupaten Kotabaru
Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Keadaan s.d 31 Desember 2018

No.	UNIT KERJA	Tingkat Golongan/Kepangkatan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kepala Badan	1	0	0	0	1
2.	Sekretaris	0	0	0	0	0
3.	Bidang-Bidang	3	1	0	0	4
4.	Subbag/Subbid	1	12	0	0	13
5.	Pelaksana	0	19	15	0	34
Jumlah		5	32	15	0	52

Sumber : BPKAD Kabupaten Kotabaru

Tabel 3.4
Jumlah ASN BPKAD Kabupaten Kotabaru
Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional
Keadaan s.d 31 Desember 2018

No.	UNIT KERJA	Tingkat Eselonering				Staf	Jumlah
		II.a	III.a	III.b	IV.a		
1.	Kepala Badan	0	1	0	0	0	1
2.	Sekretaris	0	0	0	0	0	0
3.	Bidang-Bidang	0	0	4	0	0	4
4.	Subbag/Subbid	0	0	0	13	0	13
5.	Pelaksana	0	0	0	0	34	34
Jumlah		1	0	4	13	34	52

Sumber : BPKAD Kabupaten Kotabaru

4. **Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 terdiri dari 7 Program dan 52 Kegiatan, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.5
Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja BPKAD
Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Belanja	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
1.	Belanja	37.902.470.666,-	35.247.992.316,-	92,99
2.	Belanja Tidak Langsung	15.112.063.966,-	14.293.571.936,-	94,58
3.	Belanja Langsung	22.790.406.700,-	20.954.420.380,-	91,94

5. **Proses Perencanaan Pembangunan**

Untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik terukur dan terencana diperlukan kualitas data yang baik, data dan informasi yang akurat dan valid harus tersedia demi perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Bahwa pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Proses perencanaan yang baik dan komprehensif merupakan titik penting untuk berhasilnya pembangunan. Untuk dapat menghasilkan perencanaan yang ideal maka setiap proses harus senantiasa dilakukan dengan basis data dan informasi yang valid dan terukur.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Salah satu faktor kunci keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi adalah tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya anggaran pelaksanaan kegiatan yang realitis, cukup dan memadai, namun demikian perlu adanya pengaturan dan penggunaan sumber daya dengan bijaksana.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, sampai Tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru didukung oleh 52 PNS dan 24 Orang Tenaga Honorer/Outsourcing.

Selain aset berupa sumberdaya manusia, BPKAD juga memiliki sarana pendukung lainnya, yaitu :

- 1) Tanah dan Gedung Kantor BPKAD, yang dulunya Wisma Saijaan.
- 2) Kendaraan Operasional untuk kelancaran/mobilitas kegiatan organisasi berupa 4 unit kendaraan bermotor roda empat dan 26 kendaraan bermotor roda dua.
- 3) Adanya 4 aplikasi :
 - a. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang handal, tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, dan meningkatkan kualitas sistem informasi manajemen keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
Manfaat dari SIMDA ini diharapkan mampu menyajikan data dan informasi yang sangat dibutuhkan untuk kegiatan penatausahaan keuangan dan akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
 - b. SIMDA BMD (Barang Milik Daerah) digunakan untuk penyusunan buku, kartu, dan laporan Inventaris barang

dengan output berupa KIB, KIR, Label Kode Barang, RKBU, LBMD Semesteran dan Tahunan.

- c. Aplikasi Simda Gaji digunakan untuk manajemen/pengelolaan data gaji PNSD Kabupaten Kotabaru berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT. TASPEN (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Aplikasi Komputer Simda Gaji dikembangkan berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan penggajian pegawainya. Aplikasi ini akan membantu pemerintah daerah untuk memproses penggajian secara lebih cepat, akurat serta menghasilkan dokumen penggajian yang dapat diandalkan seperti : Daftar Gaji, Gaji Terusan, Perhitungan Pajak, Daftar Pegawai dan Register-Register. Kerjasama tersebut hanya selama 2 (dua) tahun dan setiap dua tahun akan dilakukan perpanjangan kerjasama.
- d. Aplikasi Sistem Informasi Kas Daerah Online (SIKDO) yang berbasis teknologi informasi. Sejak Tahun 2014 BPKAD Kabupaten Kotabaru telah menjalin kerjasama dengan Bank KalSel dalam menjalankan Aplikasi Sistem Informasi Kas Daerah Online (SIKDO) yang memudahkan bagi Pemerintah Daerah dalam memonitor arus kas dan ketersediaan yang terjadi pada Bank KalSel sebagai bank yang ditunjuk untuk penempatan kas daerah real time. Dengan sistem ini pelayanan perbendaharaan lebih cepat dan efisien.

7. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

1. Jumlah PNS pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, masih kurang, untuk melayani 58 Perangkat Daerah, 1 PPKD serta Bupati/Wakil Bupati, perbandingan tersebut mengakibatkan beban pegawai BPKAD dalam melayani Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru cukup

besar, sehingga berpengaruh pada pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kotabaru.

2. Masih adanya keterlambatan dari SKPD dalam penyampaian Surat Pertanggung Jawaban ke Sub Bidang Administrasi Pelayanan Perbendaharaan pada Bidang Perbendaharaan sebagai Laporan Penggunaan Anggaran yang harus dipertanggungjawabkan tepat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan hal-hal teknis yang terkendala jika terjadi gangguan teknis dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah.
3. Masih kurangnya kesadaran Perangkat Daerah untuk melaporkan data Inventaris Barang yang dimiliki SKPD pada setiap tahunnya tepat waktu, sehingga menyulitkan bagi BPKAD untuk menginventarisasi data (pemutakhiran data base) sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

b. Solusi

1. Perlunya penambahan PNS di BPKAD untuk mengimbangi beban kerja yang cukup padat di lingkup BPKAD Kabupaten Kotabaru.
2. Perlunya peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan PNS dan peningkatan pendidikan formal PNS yang diarahkan pada terwujudnya kualitas sumber daya aparatur yang profesional berbasis kompetensi.
3. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran serta daya dukung sarana dan prasarana tersebut untuk menunjang proses pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal dan terencana.
4. Perlunya mewujudkan data aset daerah yang akurat.

C. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

1. Tataran Pengambilan Kebijakan

Sebagaimana terdapat dalam lampiran III.1

2. Tataran Pelaksanaan Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum

Sebagaimana dalam lampiran III.2

3. Tataran Pelaksanaan Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib/Pilihan

BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2018 tidak ada menjalin Kerjasama dengan Daerah lain.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak ada menjalin Kerjasama dengan Daerah lain.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru berkoordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah diantaranya berkoordinasi antara lain dengan :

1. BPK RI
2. BPKP
3. KPPN
4. Samsat
5. DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)
6. Kantor Pajak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tingkat Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018, rata-rata capaian kinerja Belanja Langsung untuk Tahun 2018 sebesar 97.47% dan rata-rata capaian keuangan adalah 91.94% atau sebesar Rp. 20.954.420.380,- dari pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 22.790.406.700,-

B. Saran

Untuk mengoptimalkan kinerja BPKAD perlu langkah dan kebijakan yang strategis, seperti meningkatkan Sumber Daya Manusia, baik kualitas maupun kuantitasnya, peningkatan sarana dan prasarana pendukung perkantoran serta perlunya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran serta daya dukung sarana dan prasarana tersebut untuk menunjang proses pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal dan terencana dan dengan perlunya mewujudkan data aset daerah yang akurat, untuk mempertahankan apa yang sudah diraih di Tahun-tahun sebelumnya, dan di Tahun 2018 Pemkab Kotabaru memperoleh opini BPK yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017.

LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018
KABUPATEN KOTABARU

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/tidak ada PERDA	Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : ----- Tahun ----- tentang ----- -	tidak	
			2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah ¹ seluruhnya	- Jumlah rumah ber IMB sd. Akhir Tahun 2018, sebanyak----- unit. - Jumlah seluruh rumah sd. Akhir Tahun 2018, sebanyak ----- Unit. %	
			3	Keberadaan PERDA RTRW	Ada/tidak ada PERDA RTRW	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : --- ---Tahun ----- tentang -----	tidak	
		Peraturan ttg kependudukan	4	Pengurusan KTP	Lama pengurusan KTP dalam PERDA	Dasar hukum: PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- Hr	Bilamana Perda tsb tidak menetapkan jangka waktu, dapat diperkuat dengan SOP.
			5	Biaya KTP	Biaya KTP dalam PERDA	Dasar hukum: PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang -----	Rp./ Tidakdipungut	Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP.
		Personil Satpol PP	6	Rasio personil Satpol	Jumlah personil	- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2018,	... per 10.000	

¹ Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukiman maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung.

ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)		PP terhadap jumlah penduduk	Satpol PP pada akhir tahun 2018 dibagi 10.000 penduduk x 100 %	sebanyak = ----- orang - Penduduk pada akhir tahun 2018, berjumlah = ----- orang	penduduk	
	Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.	7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS	Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- (yang mengatur PSK, PKL, atau PMKS)	Ada/tidak ada	
	Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : ---- --Tahun ----- tentang -----	Ada/ tidak ada	
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2010,	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan	Bukti Pengiriman :	Tepat/ TidakTepat	
	Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan	Bukti Pengiriman : Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor : (Belum)	Tidak Tepat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	11	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh	Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak.....urusan, yang terdiri dari:		

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
					Menteri/ Pimpinan LPND.			
		Hubungan antar daerah	12	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MoU yang masih berlaku per tahun 2018	Jumlah MoU yang masih berlaku pada tahun 2018, sebanyak ----- MoU yang terdiri dari: 1) MoU dengan -----tentang kerjasama ---- --- 2) MoU dengan -----tentang kerjasama --- ---- 3) Dst--- MOU	
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	13	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah <u>prioritas pembangunan nasional</u> ²	- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak ----- program. - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak program prioritas. %	
		Kewenangan	14	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2018 (APBD) sebanyak 2 urusan : PENDAPATAN : 1). Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.1 Kesehatan 1.2 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2). Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 2.1 Tenaga Kerja 2.2 Lingkungan Hidup 2.3 Perhubungan 2.4 Komnikasi dan Informatika 3).Urusan Pilihan 3.1 Kelautan dan Perikanan 3.2 Pariwisata		Seauai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2018 APBD terakhir. Laporan keuangan daerah.

²Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi

ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
					3.3 Pertanian 3.4 Perdagangan 4). Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang 4.1 Keuangan BELANJA 1). Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.1 Pendidikan 1.2 Kesehatan 1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.6 Sosial 2). Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 2.1 Tenaga Kerja 2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.3 Pangan 2.4 Pertanahan 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Administrasi Kependudukan dan Capil 2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.9 Perhubungan 2.10 Komunikasi dan Informatika 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.12 Penanaman Modal 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 2.14 Statistik 2.15 Kebudayaan 2.16 Perpustakaan 2.17 Kearsipan		

ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
					3). Urusan Pilihan 3.1 Kelautan dan Perikanan 3.2 Pariwisata 3.3 Pertanian 3.4 Kehutanan 3.5 Perdagangan 3.6 Perindustrian 3.7 Transmigrasi 4). Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang 4.1 Administrasi Pemerintahan 4.2 Pengawasan 4.3 Perencanaan 4.4 Keuangan 4.5 Kepegawaian 4.6 Pendidikan dan Pelatihan		
		15	Waktu penetapan PERDA APBD 2017	tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2018	Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : 32 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, ditetapkan di kotabaru pada tanggal 27 Desember 2017	Tepat	
		16	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor:30 Tahun 2017 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Ada	
		17	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar APBD Tahun 2018. 1) Pendidikan Rp. 341.739.179.076,00,- 2) Kesehatan Rp. 214.728.083.785,70,- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp. 137.694.386.918,00,- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan	51,44%	

ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
	Keuangan				Pemukiman Rp. 16.369.690.690,00,- 5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Rp. 27.320.096.579,00,- 6) Sosial Rp. 4.886.545.591,00,- Total Belanja pelayanan dasar Rp. 742.737.982.639,70,- Total Belanja APBD 2018, sebesar Rp. 742.737.982.639,70,- $\frac{\text{Rp. 1.444.007.355.213,70,-}}{\text{Rp. 742.737.982.639,70,-}} \times 100$ Rp. 51,44		
		18	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2018. 1) Pendidikan Rp. 341.739.179.079,00,- 2) Kesehatan Rp. 214.728.083.785,07,- (1+2) = Rp. 556.467.262.861,70,- Total Belanja APBD Tahun 2018 Rp. 556.467.262.861,70,- $\frac{\text{Rp. 1.444.007.355.213,70,-}}{\text{Rp. 556.467.262.861,70,-}} \times 100$ Rp. 38,54	38,54%	
	Pelayanan Publik	19	Keberadaan PERDA tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> ³ sesuai dengan peraturan perundang-	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	Apabila ADA: Sebutkan hukumnya, PERDA Nomor ----- Tahun----- tentang ----- (standar pelayanan publik')	Tidak Ada	

³Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.

ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan	
			undangan					
	Kepegawaian	20	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk	- Jumlah PNS kabupaten tahun 2018 sebanyak.....orang. - Jumlah penduduk kabupaten tahun 2018 sebanyak ----- orang	Tidak Ada		
		21	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak adanya data base kepegawaian	Apabila ADA, Sebutkan nama lengkap dari Sistem database :			
	Kelembagaan	22	Penataan SKPD	Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007	Jumlah SKPD, sbb : 1) Bagian (Setda) = unit 2) Dinas = unit 3) Badan = unit 4) Kantor = unit 5) RumahSakit = unit 6) LembagaTeknislainya = unit 7) Kecamatan/Distrik = unit Jumlah SKPD = unit	----- unit		
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	23	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2018.	PERDA yang ditetapkan padaTahun 2018, sebanyak ----- Perda (Daftar terlampir)	... PERDA	
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	24	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2018	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2018 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2018	- RAPERDA yang diusulkan tahun 2018, sebanyak ----- RAPERDA. - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2018, sebanyak ----- PERDA.	... %	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	25	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkandalam tahun 2018 x 100%	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2018, sebanyak----- keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2018, sebanyak----- keputusan.	...%	
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjut keputusan Bupati	26	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2018 x 100%	- Keputusan Bupati tahun 2018, sebanyak ---- -- keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2018 yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- keputusan. %	
		Tindaklanjut Peraturan Bupati	27	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan Bupati dalam tahun 2018 x 100%	- Peraturan Bupati dalam tahun 2018, sebanyak ----- Perbup. - Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- Perbup. %	
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	28	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	Perda yang dibatalkan, sebanyak ----- , yang terdiri dari: 1) Perda Nomor ----- Tahun 2018 tentang - ---- 2) Perda Nomor ----- Tahun 2018 tentang - ---- 3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ----- %	
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN	PERDA tentang konsultasi publik	29	Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA/PerBup	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau Perbup Nomor Tahun ----- tentang ----- (konsultasi publik)	Ada/tidak	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
	DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	30	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (websiteKabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup	Apabila ADA, - Sebutkan Nama Mediana :----- - Sebutkan Perbup nomor ----- tahun ----- tentang -----	Ada/tidak	
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	31	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2018 sebesar Rp. 1.274.837.902.874,39,- Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 1.149.487.122.270,00,-	110,90%	
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	32	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	- Belanja langsung APBD tahun 2018, sebesar Rp. 743.340.211.374,70,- - DAU Tahun 2018, sebesar Rp. 612.929.409.000,00,-	121,28%	
		Alokasi Belanja pada APBD	33	Belanja Langsung terhadap total APBD	Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%	- Total Belanja langsung APBD tahun 2018, sebesar Rp. 743.340.211.374,70,- - Total Belanja APBD Tahun 2018, sebesar Rp. 1.444.007.355.213,70,-	51,48%	
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN/ OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) X 100%	- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebesar Rp. 131.195.426.838,05,- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebesar Rp. 1.438.554.483.535,05,-	9,12%	
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	35	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016 dengan opini: WTP - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017, dengan opini : WTP - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun	Opini tahun 2016 = WTP Opini tahun 2017 = WTP	Opini, : 1) WTP/ <i>unqualified opinion</i>); 2) WDP/ <i>qualified opinion</i>); 3) TMP/ <i>disclaimer</i>

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
	JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD					2018, dengan opini : Dalam proses	Opini tahun 2018 = Dalam proses	4) TIDAK WAJAR (TW/ <i>adverse opinion</i>).
		Besaran SILPA	36	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	- SILPA Tahun 2018, sebesar Rp. 9.675.403.138,61,- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebesar Rp. 1.438.554.483.535,05,-	0,67%	
		Realisasi belanja	37	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2018, sebesar Rp.1.444.007.355.213,70,- - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2018, sebesar Rp. 1.671.991.421.356,00,-	86,36%	Realisasi belanja disesuaikan dengan LRA.
		Pengawasan Inspektorat Kabupaten	38	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2016	- Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak ----- temuan. - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2018, sebanyak ----- -- temuan. %	Inspektorat
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	39	Rasio realisasi PAD 2017 terhadap <u>potensi PAD</u> ⁴	Jumlah realisasi PAD 2017 dibagi dengan potensi PAD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2018, sebesar Rp. 131.195.426.838,05,- - Potensi PAD pada APBD Tahun 2018 Rp.%	

⁴Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Peningkatan PAD	40	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2018- PAD 2017) : PAD 2017 X 100%	- Total PAD pada Tahun 2017 sebesar Rp. 118.011.275.041,74,- Total PAD pada Tahun 2018 sebesar Rp. 131.195.426.838,05,- $\frac{(131.195.426.838,05-118.011.275.041,74)}{118.011.275.041,74} \times 100\%$	11,17%	
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	41	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2018.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2018	Penghargaan yang diterima, terdiri dari: 1) Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) atas hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru 2) An. Pemerintah Republik Indonesia Menteri Keuangan memberikan Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan Capaian Standar Tertinggi		
		Pengadaan barang dan jasa	42	Keberadaan E-procurement	Ada / Tidak ada			
		Daya saing daerah	43	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin investasi dalam tahun 2018	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2018, sebanyak ----- ijin	... ijin	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KOTABARU
NAMA SKPD : **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPN) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program 	0 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/LPND	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Tidak Ada	<p>Apabila Ada sebutkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sop Verifikasi RKA dan RKAP 2. Sop penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji 3. Sop penganggaran Hibah, Bantuan sosial dan bantuan keuangan 4. Sop penerbitan surat permintaan pencairan (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) khusus hibah, bansos dan bantuan keuangan 5. Sop pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan dan belanja daerah (ATK) 	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						6. Sop prosedur proses administrasi penomoran STS pengambilan (AKT)		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN tentang SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yg harus dilaksanakan menurut PERMEN tentang SPM 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak - PERDA yang seharusnya, sebanyak%	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 15 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 19	78.95%	Masih ada kekurangan
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional	tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2018.
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD, sebanyak 52 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak personil%	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2018.
			7	Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yg ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 15 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 15 org.	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 15 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 15 jbt.	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 2 jenis, yg terdiri dari: 1. RENJA 2. RKA/DPA	2 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/SKPD yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RPKD	10	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	100%	Mengacu dokumen RPKD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2018.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD Rp. 37.902.470.666,00,- - Total Belanja APBD Rp. 1.671.991.421.356,00,-	2,3%	Mengacu APBD tahun 2018 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD Rp. 601.822.541,00,- - Total Belanja SKPD, Rp. 35.247.992.316,00,-	1,71%	Sumber data dari realisasi APBD Tahun 2018 terakhir

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD Rp. 83.265.000,00,- - Total belanja barang dan jasa SKPD Rp. 20.352.597.839,00,-	0,41%	Sumber data dari realisasi APBD Tahun 2018 terakhir
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD Rp. 83.265.000,00,- - Total belanja SKPD Rp. 35.247.992.316,00,-	0,24%	Sumber data dari realisasi APBD Tahun 2018 terakhir
		Laporan keuangan SKPD Kasubbag. Keuangan	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, LO, Laporan Ekuitas< Neraca dan CaLK))	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, CaLK)	Apabila ada sebutkan, Laporan keuangan ada, di dalam dokumen laporan keuangan sudah ada didalam dokumen : 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan Perubahan Ekuitas 4. Neraca 5. CaLK	Ada	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada, jenis dokumennya. 1. KIB 2. RKBU 3. Daftar Pengadaan Barang	Ada	Sumber data dari BPKAD
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100%	- Aset yg tidak digunakan Rp. 1.239.723.323,75,- - Total Aset seluruh SKPD Rp. 4.498.681.656.720,64,- - Total Aset BPKAD Rp. 26.002.312.683,40,-	4,76%	Sumber data dari BPKAD

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan berupa kotak saran	2 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan tentang Pelayanan Penerbitan SP2D	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.